

**Judul** : Gantikan Peran Menteri Rini Soemarno : Sri Mulyani Mohon KAI Disuntik Modal 2 T  
**Tanggal** : Jumat, 14 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 15

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero bakal dapat suntikan modal negara melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 sebesar Rp 2 triliun.

MENTERI Keuangan (MENKEU) Sri Mulyani menyebut, PMN tersebut sudah mendapat lampu hijau dari Badan Anggaran (Banggar) dan tinggal menunggu restu Komisi VI DPR sebagai mitra kerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN.

"Pada RAPBN-P 2017 diusulkan PMN tunai kepada PT KAI sebesar Rp 2 Triliun. Kita berharap Komisi VI DPR dapat memberikan persetujuan terkait dengan suntikan modal ini," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani hadir di Ruang Rapat Komisi VI DPR menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebagaimana diketahui, hingga kini Rini masih dilarang hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR. Sebelumnya pada 2016, Menteri BUMN juga diwakili oleh Bambang Brojonegoro sebagai Menkeu saat itu.

Gantikan Peran Menteri Rini Soemarno

# Sri Mulyani Mohon KAI Disuntik Modal Rp 2 T

Menurut Ani, sapaan Sri Mulyani, berdasarkan hasil rapat Banggar DPR pada Rabu (12/7), PMN kepada PT KAI sebesar Rp 2 triliun telah disetujui dengan catatan. Yang mana, catatan tersebut harus dibahas terlebih dahulu di Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN dan yang mengurus PMN.

"Sudah dibahas di koordinasi Kemenko Luhut dan K/L (Kementerian/Lembaga) terkait agar bisa jalankan pembangunan LRT Jabodebek sesuai target 2018-2019. Untuk PMN di APBN 2017 kami mohon disetujui, PMN untuk KAI Rp 2 triliun," jelasnya.

Selain PT KAI, PMN tahun ini juga diberikan kepada PT Jakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar. Namun, sifatnya non tunai yang berasal dari konversi utang *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang dikonversi menjadi ekuitas.

Sebelumnya, Banggar menyetu-

jui anggaran pembiayaan investasi dalam rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017, khususnya anggaran investasi kepada BUMN yang meningkat menjadi Rp 6,4 triliun dari yang semula di APBN 2017 sebesar Rp 4,0 triliun. Adapun, PMN yang didapatkan PT KAI dalam RAPBN-P 2017 sebesar Rp 2 triliun, sedangkan untuk Jakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar.

"Soal PMN telah disetujui oleh Banggar, baru diserahkan ke Komisi VI," kata pimpinan Rapat Banggar DPR Said Abdullah.

Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, tambahan modal Rp 2 triliun tersebut akan menambah kebutuhan pembangunan proyek *Light Rapid Transit* (LRT) sebagaimana yang diamanatkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 49 Tahun 2017. Dalam Inpres tersebut, KAI ditugaskan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, selain

tugas sebagai operator selama ini.

"Kebutuhan pembangunan infrastruktur dan *rolling stock* Rp 27,5 triliun. Pada kesempatan ini kami mohon diberikan Rp 2 triliun," kata Edi.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro menilai, kinerja PT KAI dan PT Jakarta Lloyd semakin baik sehingga pantas diberikan tambahan PMN. Hingga Juni 2017, perusahaan tersebut sudah mencatatkan keuntungan.

"KAI juga menjalankan penugasan yang cukup besar. Sementara Jakarta Lloyd sudah bisa menarik pinjaman perbankan baik untuk investasi maupun modal kerja. Artinya sudah *ready*," kata Aloy.

## Awasi Dengan Ketat

Pengamat BUMN Naldy Nazal Haroen mengatakan, pemerintah harus mengawasi pemanfaatan PMN oleh BUMN dengan ketat.

Pasalnya, banyak perusahaan pelat merah yang sudah menerima PMN namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Terlihat masih adanya BUMN yang kinerjanya belum meningkat signifikan meski sudah menerima PMN sejak 2015 lalu. Selain itu, kerap kali PMN hanya digunakan BUMN untuk menutupi utang," kata Naldy kepada *Rakyat Merdeka*.

Naldy yang juga Ketua BUMN Watch mengatakan, besarnya anggaran PMN yang sudah diterima BUMN dalam tiga tahun terakhir, seharusnya menjadi alasan kuat pemerintah untuk menagih kinerja BUMN.

"Tapi kenyataannya, pemerintah setelah kasih PMN malah cuek saja. Harusnya kan dievaluasi, dicek pemanfaatannya. Kalau tidak dialokasikan untuk peruntukan awal atau pemanfaatannya tidak sesuai, ya jangan dikasih lagi tahun berikutnya," tegasnya. ■ NOV